

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut makhluk sosial karena sering bertukar informasi dan komunikasi dari orang lain dalam suatu interaksi. Interaksi antarmanusia dalam membagikan informasi telah mengalami perubahan yang sangat pesat; bila dahulu penyampaian informasi dan komunikasi menggunakan surat, kentongan dan telegram, sekarang dapat dengan mudah dilakukan melalui *handphone*, internet, dan alat komunikasi berbasis jaringan lainnya.

Internet merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Melalui internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya kehidupan di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengobrol, transaksi bisnis dan menggali berbagai informasi.

Perkembangan teknologi di masa sekarang sangat mengubah perilaku masyarakat. Berbagai lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengekspresikan apa yang dialami dengan memanfaatkan fasilitas internet. Meskipun demikian, masyarakat juga harus berhati-hati dalam penggunaannya karena jika tidak berhati-hati akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat seperti adanya kejahatan melalui internet atau sering disebut dengan *cybercrime*.

Cybercrime adalah aktivitas manusia di dunia maya (maya) yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya akses ilegal,

perusakan situs, intersepsi ilegal), dan aktivitas manusia yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya pemalsuan kartu kredit, pornografi via internet)¹. Dengan kata lain, *cybercrime* merupakan kejahatan terhadap komputer dan kejahatan melalui komputer.

Salah satu contoh tindak pidana *cybercrime* adalah pencemaran nama baik melalui internet, dimana seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang memuat unsur hinaan melalui internet dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korban. Kata pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disebut sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang nama baik dan martabat seseorang yang dilakukan di muka publik.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia cukup banyak terjadi. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang sangat menyita perhatian publik di Indonesia adalah kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit (RS) Omni Internasional yang terjadi pada tahun 2009. Dalam kasus ini Prita mengirimkan sebuah *e-mail* kepada kerabatnya tentang keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional. RS Omni Internasional tidak terima atas tuduhan yang dilakukan Prita dan menganggap bahwa ia mencemarkan nama baik RS. Pada akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Prita terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 27

¹ Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. v.

ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain kasus Prita Mulyasari, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial juga terjadi di Yogyakarta yang dilakukan oleh Florence Sihombing, mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam hal ini, Florence menghina masyarakat Yogyakarta melalui media sosial *Path*. Florence didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Florence divonis hukuman 2 (dua) bulan penjara dan masa percobaan selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Florence juga didenda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 bulan penjara².

Perbuatan melawan hukum di dunia maya seperti pencemaran nama baik sudah menjadi salah satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Terkait hal tersebut maka sangat penting bagi pemerintah melakukan antisipasi atau upaya penanggulangan melalui hukum pidana. Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban membuat regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut³. Regulasi dalam penegakan hukum pidana, menjadi dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana

² Internet, 4 November 2017, news.liputan6.com.

³ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 40.

didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan)⁴.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus ditanggung oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi⁵. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Undang-undang ini sudah mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.

Dalam UU ITE, sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun Pasal 45 ayat (3) menyatakan bahwa:

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

⁴ Dicky Refliyanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Internet (Cyber bullying)*, Internet, 27 September 2017, <http://sitedi.uho.ac.id>.

⁵ Siswanto Sunarso, *op.cit*.

Sanksi dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE tersebut, sebenarnya merupakan *lex specialis juncto* Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempatkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Dalam skripsi ini, Penulis mengambil salah satu kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah dilaporkan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Riza Maulana Putra bin Edi, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet. Kasus ini telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat dan telah disidangkan yang akhirnya dihasilkan putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm. Dalam putusan tersebut terdakwa dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Penulis sangat tertarik untuk mengangkat kasus ini untuk dijadikan penelitian dikarenakan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa berbeda dari tuntutan Penuntut Umum. Dalam kasus ini Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 1

(satu) tahun sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda masih sama sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis memilih judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis. Adapun manfaat yang dapat dipaparkan, yaitu:

1. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan bagi masyarakat dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis sendiri.
2. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terutama pada hukum *cyber*.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks⁶. Metode ini berdasarkan pada (1) bukti-bukti nyata berupa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan (2) menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data dengan melakukan wawancara terhadap Hakim sebagai nara sumber. Metode ini tidak menggunakan angka-angka atau data kuantitatif.

⁶ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 55.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengkaji terlebih dahulu penerapan hukum terhadap keadaan riil di lapangan penelitian; dalam hal ini, mengkaji antara hukum yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dengan kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari, untuk mendapatkan data yang pasti/akurat. Kajian tersebut digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci pokok-pokok permasalahan, yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan mencari hubungan sebab-akibatnya, kemudian diuraikan secara rinci dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat para ahli.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm. Adapun elemen penelitiannya adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A dan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang pernah memutus kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk mencari data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, berkas perkara dan situs-situs *website* yang ada hubungannya dengan penelitian. Bahan-bahan tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, jurnal, teori hukum, internet, dan pendapat para ahli.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu metode dalam mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan dan

berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Teknik yang digunakan penulis adalah dengan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung terhadap pihak yang diwawancarai. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Bapak Purwanta, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang pernah memutus perkara pada putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, diolah, diperiksa, dipilih dan *edit* untuk memilih data yang diperlukan atau sesuai dengan objek penelitian, yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang sudah diolah dianalisis secara kualitatif, dan dijadikan sebagai pembahasan. Dari hasil pembahasan itu sendiri akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab setiap permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, dokumen putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang memutus kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Hasil analisis tersebut kemudian akan disusun sebagai hasil penelitian berbentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi penulisan hukum, maka proposal disusun dalam 4 (empat) bab, yang terdiri dari Bab I mengenai pendahuluan, Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, Bab III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV mengenai Penutup. Sistematika penulisannya adalah sebaga berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana, sanksi pidana, teori pemidanaan, pengertian

cybercrime, pengertian pencemaran nama baik, sanksi pidana pencemaran nama baik.

3. BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dipaparkan mengenai gambaran umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A, pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm dan hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN.Tsm.

4. BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian.

